

**DI BALIK REALITAS SEMU:
STUDI KRITIS IDEOLOGI DAN
KUASA POLITIK JAWA DI
PEMILIHAN WALI KOTA
SURAKARTA 2020**

Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2021, 10 (2):471-490

Muhammad Alif Alauddin¹, Rezza Dian Akbar²

Abstract

The role of ideology in political contestation reflects political spectrum hand-in-hand. In order to achieve the highest position of the power, there are many ways to impress individuals to preferably elect candidates which then leads to political orientation. This study attempts to explore the meaning of ideology and power which is constructed inward the people of Surakarta's perspective in the 2020 Mayoral Election. The nature of research is interpretive qualitative through descriptive approach. Authors elaborate structuration theory proposed by Anthony Giddens in investigating power within the political orientation. This study likewise uses critical study technique to reveal the in-fact phenomenon beyond the interpretive does. In collecting the data, this study uses interviews, observations, and documentation studies of supporting literature. The selected informants are divided into two groups; political elite of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Prosperous Justice Party (PKS) as well as the individuals. Surakarta city is the location of this study with all sub-districts are taken by each one person as an informant of the whole population. The results of this study are divided into two major parts; 1) the meaning of ideology remains infiltrated in the people of Surakarta City which is represented by the Pancasilaist group, Gibran Rakabuming Raka is manifested as Joko Widodo, and the political orientation of the community is formed due to the strong social capital of the party thus further reconstruct the preferences of voters, 2) critical studies conceives party has been only sheltering in false consciousness of ideology and society interprets ideology in partial way. To conclude, authors define that circumstance as an ideological manipulation through political interests and pseudo-use of Javanese power as it describes symbolic glorification of individuals

Keywords: Political Ideology, Javanese Power, Pseudo Reality, Political Orientation, Surakarta Mayoral Election 2020

Abstrak

Peranan ideologi dalam kehidupan berpolitik merupakan pergelaran wajib bagi setiap spektrum politik. Demi mencapai pucuk kekuasaan tertinggi, berbagai cara untuk menarik minat masyarakat untuk memilih calon sangat gentar dilancarkan yang kemudian mengarahkan kepada orientasi politik. Studi ini mencoba menggali makna ideologi dan kekuasaan yang terkonstruksi di masyarakat Kota Surakarta selama Pemilihan Wali Kota 2020. Dengan desain penelitian berupa kualitatif interpretif melalui

¹ Migration, Integration, and Ethnic Relation, Utrecht Summer School, Utrecht University

² Program Studi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret

¹malifaaa@gmail.com

pendekatan deskriptif, penulis mengelaborasi teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens. Studi ini juga menggunakan studi kritis untuk menggali fenomena di balik data interpretif. Dalam mengambil data, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi berupa literatur pendukung. Informan yang dipilih dibagi menjadi dua kelompok yaitu elit politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga masyarakat umum. Kota Surakarta merupakan tempat pengambilan lokasi penelitian ini dengan seluruh kecamatan peneliti ambil masing-masing satu orang sebagai informan masyarakat umum. Selain itu, studi ini juga menggunakan telaah kritis dari pemaknaan ideologi dan kekuasaan yang dibayangkan oleh masyarakat. Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua bagian besar; 1) pemaknaan ideologi masih sangat mengakar di masyarakat Kota Surakarta yang dalam ini diwakilkan oleh kelompok Pancasila, Gibran Rakabuming Raka dimanifestasikan sebagai Joko Widodo, dan orientasi politik masyarakat terbentuk akibat kuatnya modal sosial partai sehingga merekonstruksi preferensi pilihan konstituen, 2) studi kritis melihatnya bahwa partai selama ini hanya berlindung dalam selimut ideologi dan masyarakat memaknai ideologi secara parsial. Sebagai kesimpulan, penulis mendefinisikan keadaan itu sebagai manipulasi ideologis melalui kepentingan politik dan penggunaan kekuasaan Jawa secara semu karena menggambarkan pengagungan simbolis terhadap individu.

Kata Kunci: Ideologi Politik, Kuasa Jawa, Kesadaran Semu, Orientasi Politik, Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020

PENDAHULUAN

Ideologi yang dianut oleh partai politik di Indonesia tentu mengakar pada kebudayaan jauh sebelum berdirinya Indonesia sebagai negara. Beragam bentuk ideologi yang kemudian diaplikasikan sebagai partai politik meliputi Islam, komunisme, sosialisme, dan liberalisme yang tercermin pada awal masa kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya waktu, kini terdapat dua ideologi yang mewarnai partai politik di Indonesia yaitu yang berlandaskan pada Pancasila dan Islam sebagaimana yang disebutkan pada studi Aspinall *et al.* (2018). Hingga kini perdebatan mengenai spektrum politik mana yang paling representatif terhadap konstelasi politik di Indonesia terus menjadi diskursus. Kini apabila membicarakan partai politik mana yang paling mewakili mayoritas konstituen, agaknya sulit karena basis kebudayaan Indonesia sangat majemuk.

Dalam upayanya sebagai lembaga sosial, partai politik di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Terlihat dari beberapa pemilu baik pemilihan eksekutif ataupun legislatif yang telah digelar, sebagian

partai mampu menarasikan ideologinya ke dalam kebudayaan masyarakat asli, namun ada pula yang gagal. Sebagaimana halnya yang terjadi di Pemilihan Legislatif 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun masyarakat Jogja identik dengan kepatuhannya menjalankan nilai dan norma Islam yang kuat sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Peacock (1978), Pemilu menunjukkan hasil sebaliknya. Justru partai yang berhaluan nasionalis-pancasila yang dominan meraih suara tertinggi dalam pemilu legislatif DPR RI tingkat nasional. PDIP meraih suara tertinggi yaitu 19.91%. Kemudian disusul oleh Partai Gerindra dengan perolehan 12.51% dan Partai Golkar dengan 12.15%. Sedangkan partai yang berhaluan islam jauh tertinggal di posisi ke empat yaitu PKB dengan perolehan 9.72%, disusul berurutan yaitu PKS, PAN, dan PPP setelahnya. Contoh ini merupakan potret dinamika politik yang dinamis.

Mengenai ideologi politik di Indonesia, banyak penelitian yang telah dikembangkan terlebih pasca reformasi 1998. Seperti artikel yang ditulis oleh Noor (2016) pergeseran pilihan rasional yang semula berlandaskan pada paham-paham yang bersifat ideologis ketika orde baru menuju lebih bersifat materi bahkan beralih menjadi golongan putih (golput) pasca reformasi. Suburnya partai politik hari ini tidak diikuti dengan kuatnya penanaman ideologi politik. Menurut Noor (2016), justru ketika orde baru partai politik memiliki basis pendukung yang kuat karena berhasil melakukan penetrasi ideologi hingga kalangan bawah. Setelah reformasi, masyarakat tidak lagi mengandalkan partai politik sebagai sebuah *common political agenda*, justru bermunculan praktik pembelian suara (*buying voters*). Potret semacam ini merupakan pergeseran orientasi politik yang semula memilih berdasarkan kesamaan visi, tujuan, atau ideologi menjadi pragmatis.

Potret di atas juga diamini oleh Aspinal *et al.* (2018) yang menerangkan bahwa Politik Indonesia didominasi oleh "kartel" partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk berbagi jabatan, bukan didasari oleh diferensiasi ideologis atau kebijakan. Akibatnya, partai-partai berkeinginan untuk membentuk apa yang disebut "koalisi pelangi" (*rainbow coalition*) yang sangat luas dan heterogen, terlepas dari ideologi partai yang menganut Islam dan non-Islam.

Lebih lanjut mengenai kontestasi politik di Kota Surakarta, penelitian sosiologis telah dilakukan oleh Gama *et al.* (2019) mengenai budaya blusukan dan *personal branding* pada Pemilu Kota Surakarta 2010. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa budaya blusukan termasuk dalam kampanye interpersonal yang mana ia membungkus citra kandidat dekat dengan pemilih yang kemudian terbangun rasa kedekatan emosional. Hal serupa menginspirasi Rudy pada Pilkada Kota Solo 2015 lalu sehingga mengadopsi cara yang serupa (Valiana, 2017). Penelitian serupa juga dilakukan lebih spesifik oleh Arif (2018) yang menggali aspek populisme dan gerakan organisasi masyarakat sipil yang menjadi faktor pengaruh Jokowi pada Pilwalkot Kota Solo tahun 2005 dan 2010. Menurut Arif (2018) keterlibatan organisasi masyarakat sipil pada suatu periode kepemimpinan wali kota Joko Widodo menguatkan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat bawah. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang membersamai pemerintahan Wali Kota Joko Widodo adalah ITPI, KOMPIP, IPGI yang berfokus pada kebijakan pro-kaum miskin seperti perumahan kesehatan dan pendidikan bagi kaum miskin. Selain itu, Joko Widodo juga menggenjot program populis yang penuh dengan pragmatisme selama memimpin Kota Solo. Program tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan yang bersifat fisik maupun administrasi yang kemudian melejitkan popularisme seorang Jokowi di kancah perpolitikan nasional. Dengan berjalannya program populisme tersebut, menurut Arif (2018), Joko Widodo berhasil menarik kepercayaan publik sehingga dengan mudah terpilih dengan suara mayoritas 90% pada Pilwalkot selanjutnya.

Selain penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens. Dalam memahami teori ini, terdapat kata kunci yang bisa memudahkan yaitu agen (*agency*) dan struktur (*structure*). Arti singkat dari agen sendiri yaitu individu yang melakukan praktik sosial yang melampaui batas ruang dan waktu. Sedangkan struktur dijelaskan sebagai *rules and resource* (Giddens, 1984). Teori ini menjelaskan dan mengintegrasikan antara kedua unsur tersebut yang mana menurut Giddens, individu (agen) dan struktur sosial tidak dapat dipisahkan karena mereka justru menjelaskan tindakan sosial (*social action*). Agen (*agency*) diposisikan dalam lingkup mikro.

Menurut Giddens (1984), secara istilah agen bukan sekedar diartikan sebagai individu saja melainkan kemampuan individu dalam membuat pilihan di masyarakat (*individual ability to make choice in society*). Pilihan individu tersebut bersifat *free-will* yaitu keinginan bebas yang lahir dari hasrat individu tersebut. Pada akhirnya, agen ini akan menguatkan solidaritas sosial. Lain halnya dengan struktur, menurut Giddens (1984), lingkup makro adalah cakupan dari struktur. Terdapat satu sifat dari struktur yaitu mempengaruhi individu. Ia memaksa individu untuk mengikuti kaedah yang ditetapkan

Berdasarkan beragam tinjauan historis dan teoritis di atas, penelitian ini berusaha untuk mengulik orientasi politik masyarakat Kota Solo serta potret realitas sesungguhnya di balik Pemilihan Wali Kota 2020. Rumusan masalah pada penelitian ini berlandaskan pada bagaimana peran ideologi politik dalam merekonstruksikan preferensi politik di masyarakat Solo baik secara individual dan kolektif? Bagaimana ideologi dimanifestasikan sehingga determinan pada orientasi politik pemilih?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dan studi kritis. Pendekatan kualitatif interpretif mengedepankan riset yang bersifat deskriptif induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan khusus menuju kesimpulan umum (Suparlan, 2014). Penelitian ini juga mengelaborasi metode studi kritis. Studi kritis ialah sebuah sudut pandang bahwa struktur sosial dipandang sebagai bentuk penindasan atas seseorang atau komunal (Harvey, 1990). Bentuk penindasan tersebut dilegitimasi secara dominan oleh ideologi. Maka, telaah studi kritis mencakup perspektif yang totalistik atas penindasan yang dipertontonkan oleh ideologi. Studi kritis menggali di balik permukaan melalui analisis langsung atas fenomena sosial karena mazhab ini tidak mengakui objek studi atau temuan penelitian sebagai fakta objektif yang timbul di masyarakat, namun sebaliknya ia memotong hal-hal yang nampak tersebut. Kemudian, studi kritis juga menganalisis baik struktur sosial yang nampak ataupun manifestasi ideologi dan proses keberlangsungan keduanya (Harvey, 1990).

Memasukan kacamata studi kritis pada penelitian ini, terdapat beberapa pembabakan yang akan penulis lakukan. Pertama, telaah ideologi nasionalisme yang masih relevan di perpolitikan terutama di Pilwalkot Solo 2020. Kedua, pemaknaan kekuasaan yang dominan diungkapkan oleh masyarakat Kota Solo dan orientasi politik terhadap Gibran – Teguh. Seluruh pembabakan tersebut mengacu pada hasil temuan dan analisis pada sub pembahasan sebelumnya yang mana penulis menggunakan teori strukturasi melalui pisau bedah kualitatif deskriptif. Kemudian penulis melakukan kritik terhadap temuan sesuai dengan kaidah-kaidah studi kritis yang menurut Harvey (1990) mencakup abstraksi (*abstraction*), keseluruhan (*totality*), esensi (*essence*), praktek (*praxis*), ideologi (*ideology*), struktur (*structure*), sejarah (*history*), dan dekonstruksi & rekonstruksi (*deconstruction and reconstruction*).

Adapun penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang menurut Sugiyono (2012: 126) adalah cara penentuan informan dengan pertimbangan dan penilaian tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria informan tersebut adalah: 1) elit partai politik, dan 2) kader aktif. Peneliti mengerucutkan sampel pada tingkat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Kota Surakarta yang mana membawahi masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan Selanjutnya, peneliti melakukan *cross checking* pada informan selain dua kriteria di atas yakni 1) simpatisan partai politik, 2) dan masyarakat umum yang mengikuti Pilwalkot 2020. Adapun simpatisan dibatasi dari masing-masing partai hanya dua orang per partai politik. Sedangkan masyarakat umum dipilih berdasarkan lima kecamatan di Kota Solo, namun karena keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19, peneliti memanfaatkan *Whatsapp* sebagai model wawancara jarak jauh. Tujuan dilakukan hal demikian untuk melihat apakah ada pengaruh ideologi yang dilakukan oleh elit dan kader partai yang pada akhirnya memengaruhi orientasi politik di tingkat *grass root*.

Dalam memilih partai politik, peneliti juga melakukan teknik *purposive* yaitu hanya partai yang memiliki pemahaman ideologi yang mengakar (*rooted ideology*) yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), mengacu pada studi Mietzner (2012) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PDIP menganut ideologi Pancasila, diperkuat dengan laporan Bulkin (2013) dari Carnegie Endowment for International Peace, sedangkan PKS merupakan partai yang paling kuat basis ideologi Islam (Aspinall *et al.* (2018); Geraldy, 2019; Machmudi, 2008), yang sebagian besar menysasar masyarakat perkotaan. Dua spektrum ideologi Pancasila dan Islam yang melekat pada sejumlah partai politik di atas merupakan subjek penelitian pada studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jalan Panjang Pergerakan Spektrum Politik Kota Surakarta

Dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, kerajaan Islam Mataram yang didirikan pada abad ke-17 adalah cikal bakal kerajaan Surakarta menuju penyebaran agama Islam yang sekarang disebut Keraton Surakarta Hadiningrat. Sri Sunan sebagai raja memiliki posisi sah yang sangat berkuasa penuh kepada rakyatnya (Margana, 2010). Ia memegang kuasa legitimasi atas pemerintah dan agama sekaligus. Pada bidang sosial-budaya, masyarakat Jawa menganut suatu filosofi yaitu harus patuh pada Sri Sunan karena mencerminkan norma kesopanan. Akibatnya, penyebaran Islam yang sangat masif di Surakarta sangat dipengaruhi oleh peran Sri Sunan (Alauddin & Asyifani, 2020). Fenomena seperti itu, dalam penelitian Joebagio (2017), juga dilakukan oleh raja-raja di Eropa yang menyalahgunakan bahasa politik, *cuius regional eius et religio*, berarti 'raja agama (katolik) akan diikuti oleh semua orang di wilayah itu.

Pada awal masa kemerdekaan, Kota Solo telah menjadi arena tarung bagi dua spektrum ideologi politik besar Indonesia yaitu komunisme dan Islam. Hal ini tercermin bahwa berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 sebagai organisasi yang berbasis pada ekonomi umat pertama di wilayah nusantara yang didirikan oleh seorang pengusaha batik asal Solo bernama H. Samanhoedi (Yahya, 2016). Dengan menguatnya spektrum politik Islam yang dikomandoi oleh cendikiawan dan politikus muslim yang tergabung dalam gerbong SDI, Kota Solo pada masa itu sangat identik

dengan nuansa konservatis. Perjuangan melawan Belanda sangat kental dengan slogan dan panji Islam kala itu.

Kota Surakarta selanjutnya menjadi basis kuat penyebaran ideologi komunisme yang digagas oleh Hadji Misbach, Moetakallimoen, Partoadmodjo, Sastropanitro, Soewarno, Sandjojo, Sjarief, Hardjodiwongso melalui SI Merah pasca kemerdekaan (Larson, 1990 dalam Sari, 2011). Perjuangan khas komunisme di Kota Solo ialah perpaduan antara Islam dan Marxisme. Adalah Hadji Misbach yang mengawali gerakan tersebut dengan khutbah-khutbahnya mengenai kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sehingga membuatnya terkenal dengan julukan “haji merah”. Jejak sejarah yang dilakoni oleh Misbach pada awal masa kemerdekaan ini yang selanjutnya terus berkembang hingga pasca kemerdekaan.

Hingga hari ini, setidaknya tercatat 5 partai politik pemenang yang pernah menduduki kursi wali kota Surakarta yang diwakili oleh 3 spektrum besar; nasionalis oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); agamis oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini membuktikan bahwa Kota Solo merupakan rumah bagi ketiga spektrum politik utama Indonesia yang disokong oleh pengaruh ideologi dan aspek sosiologis masyarakat yang majemuk. Kendati demikian, tak hanya Kota Solo yang mengalami silih bangun ketiga spektrum politik tersebut, kota besar lain di Indonesia juga serupa seperti Surabaya, Karanganyar, Cilacap, Cirebon, Salatiga, Magelang, Magetan, Blitar, Madiun, Ngawi, dan Banyuwangi.

Pemaknaan Ideologi Masyarakat Kota Surakarta

Ideologi dalam tubuh partai politik berelevansi dengan tindak tanduk yang dimanifestasikan dalam kegiatan internal dan ekseternal partai. Dalam pembahasan ini, penulis berusaha menggali makna ideologi yang diadopsi oleh masyarakat umum Kota Surakarta. Pemaknaan ideologi yang dimengerti oleh masyarakat umum akan mencerminkan preferensi calon

yang dipilih pada Pilkada Solo, apakah memilih Paslon Gibran – Teguh, Bagyo – Suparjo, ataupun golput/abstain.

“Ideologi mendasari tujuan, arah gerak politiknya, strategi, dan manuver yang diambil. Ketika dia memiliki ideologi yang baik maka langkah politiknya dan arah geraknya jelas mengarah ke hal yang baik. Akan terayomi pula seluruh masyarakat.”

(Wawancara dengan UII via daring, pada 26 Maret 2021 pada 16.00 WIB)

“...Ini saya kira jelas sekali bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sebagai pisau analisa itu mampu melakukan pembedahan forensik terhadap problematika yang dihadapi masyarakat karena sejak dahulu bukan problematikan itu tidak dilihat, dilihat tapi untuk melakukan tindakan darimana dulu itu bedah forensiknya gak pernah terjadi sehingga siklus kemunduran dan kemiskinan itu tidak pernah diretas.”

(Wawancara dengan PG di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Kota Surakarta, pada 16 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB)

“Kalo pemilu bawa-bawa ideologi partai itu gak terlalu penting sih, karena sebagai masyarakat ga terlalu peduli juga menurutku. Justru yg perlu itu lebih ke personalnya, seperti gagasan, visi, misi. Kan ada orang kalo suka partai A, trus ga suka sama orang partai B meskipun personalnya bagus gitu. Nah kalo aku ga mandang partai/ideologi/agama. Jadi (bawa ideologi) kalo pemilu ga penting.”

(Wawancara dengan LDA via daring, 24 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB)

Pemaknaan terhadap Orientasi Politik Gibran – Teguh dan Bagyo - Supardjo

Calon walikota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa menyimpan ragam pemaknaan di dalam pikiran dan pengalaman masyarakat Kota Solo selama Pilwalkot berlangsung. Gibran yang baru memulai karir politiknya dalam kurang dari 1 tahun, telah berhasil memenangkan Pilwalkot dan telah resmi dilantik menjadi Wali Kota Solo ke-18 pada 28 Februari 2021. Datang sebagai rival, Bagyo Wahyono – Suparjo Fransiskus Xaverius maju dari jalur independen yang berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 35.000 KTP. Dengan kendaraan politik yang disokong oleh organisasi masyarakat Tikus Pithi Hanata Baris. Ormas ini didirikan oleh Tuntas Subagyo pada 2014 yang

bergerak di bidang sosial masyarakat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Berikut kutipan wawancara yang penulis rangkum mengenai perspektif masyarakat terhadap kedua paslon.

“(Gibran itu) anak muda. Kedua, anaknya presiden. Kalau anaknya presiden pasti pembangunan Solo lebih cepet. Otomatis semua akan mengalir ke sini berapapun pasti ke depannya pembangunan Solo akan gencar. Kayaknya paling engga 5 tahun pertama itu pembangunan cepet”.

(Wawancara KRIS di kediamannya, 27 Maret 2021, pukul 09.30 WIB)

“Kalau yang saya pahami itu (majunya Gibran) lebih ke dinasti politik dan hegemoni politik. Bagaimana menguasai politik tapi caranya melalui pendekatan dinasti karena memiliki darah dengan presiden. Itu salah satu pintu masuk, Itu (hegemoni politik) merupakan cara yang gak cantik tapi itu yang terpaksa dipakai karena punyanya itu.”

(Wawancara dengan AM di Kantor PPAT pada 17 Maret 2021 pukul 16.00)

“Kayak Bajo tu dipaksain maju buat jadi penantang Gibran, daripada lawan kotak kosong. Makanya tak kasih suaraku biar ga sia-sia yang buat scenario”.

(Wawancara dengan LDA via daring, 24 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB)

Pembahasan

Analisis Ideologi dan Kuasa Politik

Masyarakat Kota Solo masih mempertimbangkan ideologi dalam kontestasi politik. Menurut mereka, ideologi merupakan pisau analisis yang diejawantahkan pada kebijakan strategis guna menjawab tantangan dan keresahan bersama. Ideologi menjadi determinan atas pengaruhnya untuk mewujudkan kebaikan dan perbaikan terlepas dari jenis ideologi apapun yang dianut oleh partai politik manapun (Budiardjo, 2003; Dobratz, 2010; Drake, 2010; Eagleton, 2014; Alauddin & Asyifani, 2021). Selain itu, secara diferensial terdapat dua spektrum ideologi yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Kota Solo yakni nasionalisme dan agama. Dalam konteks nasionalisme, Pancasila merepresentasikan hal itu. Pancasila adalah filosofi

ideologi yang sangat sekuler dan digunakan sebagai dasar negara (Notonegoro, 1971; Morfit, 1981).

ELIT POLITIK

1. Ideologi berperan besar dalam nafas juang partai.
2. Metode kerja politik dan metode kerja kebijakan mengacu pada ideologi partai yang dianut terlebih pada Pancasila.
3. Dengan menguasai pemerintahan, partai politik lebih leluasa menerjemahkan ideologinya ke dalam kebijakan strategis.
4. Kebaikan dan perbaikan merupakan esensi utama dari ideologi partai politik yang diperjuangkan.
5. Pondasi partai politik adalah ideologi.

MASYARAKAT UMUM

1. Ideologi tidak penting dalam berpolitik karena tidak menjamin keberhasilan kepemimpinan.
 2. *Track record* dari calon lebih penting ketimbang latar belakang ideologi yang dianut.
 3. Pancasila adalah ideologi yang dicetuskan oleh Bung Karno dan menjadi properti intelektual milik PDI-P atas trah keluarganya yang masih bersambung.
 4. Dua spektrum ideologi; agama dan nasionalisme menyeimbangkan stabilitas politik.
-

Tabel 1. Pemaknaan Ideologi Berdasarkan Pembagian Informan

Masyarakat Kota Solo yang penulis jumpai, sebagian besar mengaku berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi dalam berpolitik. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat baik di tingkat elit ataupun umum (lihat tabel 1). Namun yang menarik adalah, terdapat satu pandangan yang menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat Kota Solo dalam memahami Pancasila sebagai ideologi justru hanya terpaut pada salah satu partai tertentu saja. Bagi mereka, Pancasila diyakini sebagai properti intelektual milik PDI-P; Pancasila adalah PDI-P dan PDI-P adalah Pancasila. Potret pemaknaan ini seyogyanya berimplikasi pada pemahaman parsial sebagian masyarakat Kota Solo. Secara terbatas, Pancasila dimaknai sebagai perwujudan dari partai politik

Analisis Strukturasi Orientasi Politik dan Kekuasaan atas Gibran dan Bajo

Menelaah *structure* sebagai turunan dari teori strukturasi, ia adalah seperangkat sistem yang terbangun dari seperangkat peraturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*). Peraturan (*rules*) yang menjadi salah satu unsur strukturasi memiliki turunan lain yaitu *procedural rules* yaitu tata krama & bahasa, dan *moral rules* yaitu apa yang diperbolehkan dan dilarang (Syahri, 2015). Pada penelitian ini, *procedural rules* adalah adat istiadat yang terpaku dalam tatanan masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi moralitas dan pengakuan absolut terhadap status-quo. Masyarakat Jawa, yang dalam studi ini dikonsentrasikan pada lingkup Kota Solo, masih terbawa oleh romantisme feodal yang menempatkan Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran sebagai pemilik tunggal sumber kekuasaan. Pemaknaan tersebut bergeser semula pada dua kerajaan tersebut ke trah keluarga Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Kemudian, unsur lain dalam *structure* ialah *material resources* yang terdiri dari berbagai macam kapital sedangkan *resource of authority* adalah organisasi formal yang mengakuisisi legitimasi dan otoritas (Stones, 2005; Ritzer & Godman, 2004). Partai politik bertransformasi sebagai pengatur dan pemilik otoritas dan salah satu unsur *structure* terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Berdasarkan temuan yang penulis kumpulkan, bagaimana PDI-P mensolidkan kedudukan partai di konteks Pilwalkot Solo 2020 sangatlah kuat dimulai dari tingkat mikro yaitu Pengurus Anak Ranting (PAC), Ranting, Anak Cabang (AC), dan petugas DPC hingga kader non-struktural bernama Regu Penggerak Pemilih (GURAKLIH) yang bertugas pada hari pemungutan suara.

Kuatnya basis PDI-P di Kota Solo yang penulis jabarkan di atas, dalam kacamata Giddens (1984), juga termasuk dalam telaah dualitas struktur yang mana dalam dimensi *structure* salah satunya terkandung dominasi. Struktur dominasi menerangkan cakupan penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Hegemoni yang ditunjukkan oleh terkondisikannya struktur partai dari tingkat kota hingga RW menunjukkan

eksistensi PDI-P sebagai *structure* dalam kacamata teori strukturasi telah bekerja dengan baik. Penguasaan sumber daya politik dengan sumber daya manusia yang melimpah dan solid selanjutnya akan mengarah pada penguasaan terhadap kekuasaan (*controlling over the power*).

Penyelewengan Ideologi sebagai Alat Politik

Mengacu pada hasil penelitian ini, informan yang penulis temui condong bahkan mengakui bahwa mereka adalah penganut Pancasila sejati, agaknya telah menyelewengkan struktur ideologis dari Pancasila itu sendiri. Hal ini dibuktikan, mereka yang memilih Gibran – Teguh sebagian besar berafiliasi dengan PDI-P yang memang termaktub Pancasila adalah ideologi dan jalan juang partai. Pemilih Gibran yang adalah penganut Pancasila sebagai ideologi, demikian mereka berkata, sejatinya mengartikan Pancasila secara parsial saja. Pemaknaan mereka atas Pancasila tidak didorong oleh kesadaran kolektif namun kesadaran praktis

Penulis berargumen bahwa jiwa pancasilaisme itu hanya sebatas sebagai pendukung PDI-P. Mereka mengartikan untuk menjadi seorang pancasilais satu-satunya cara ialah mendukung PDI-P dan calon walikota yang diusung. Dalam hal ini, Pancasila mengalami penyempitan makna yang seharusnya dimanifestasikan dalam satu kutub ideologi besar, apabila dikatakan sebagai ideologi (Notonegoro, 1971), dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Justru pancasila dimaknai secara sempit sebagai agenda politik praktis. Mereka yang mengaku sebagai pancasilais sejatinya hanya menggunakan label Pancasila sebagai topeng guna merebut kekuasaan dan simpati masyarakat. Pun, dalam penuturan yang dikemukakan oleh elit PDI-P bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kader partai yang bertugas di walikota ataupun di legislatif memperjuangkan kepentingan rakyat dan ruh Pancasila, pada faktanya sejatinya tidak selalu demikian. Maka pertanyaan lain yang kemudian muncul; apakah ketika kritik datang dari luar PDI-P dikatakan anti Pancasila? Apakah selain PDI-P tidak berjiwa pancasilais?

Bahkan secara radikal penulis mengungkapkan bahwa PDI-P berlingkang dalam selimut Pancasila untuk mendulang suara dan simpati masyarakat. Keadaan yang sebenarnya terjadi ialah, bahwa struktur masyarakat Kota Solo secara sosiologis mengakar pada adat-istiadat Jawa, memegang erat nilai dan norma yang kemudian kondisi tersebut dimanfaatkan oleh PDI-P alih-alih kesamaan dan menjaga jiwa Pancasila. Penulis menyebut fenomena ini sebagai manipulasi ideologi untuk kepentingan politik (*ideological manipulation through political interest*). Seharusnya, Pancasila lebih berarti dari sekedar agenda politik praktis. Apabila mereka mengakui Pancasila sebagai ideologi, maka perlakukanlah ia sebagaimana ideologi lain semestinya diperlakukan. Ideologi seharusnya diartikan sebagai kepercayaan (*belief*), cara memaknai fenomena hidup; sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dsb. Tidak terkukung dalam jeruji politik elektoral. Dalam studi kritis, solusi ini disebut sebagai proses *deconstruction and reconstruction*.

Kuasa Politik Jawa dan Realitas Semu

Bisa dikatakan bahwa studi ini sesungguhnya menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Anderson (1990) mengenai bahasa dan kuasa Jawa dan Antlov & Cederroth (1994) tentang konsep otoritarianisme kepemimpinan Jawa. Sebagaimana yang penulis sampaikan di pembahasan sebelum ini, bahwa masyarakat Kota Solo terseret oleh romantisme konsepsi kekuasaan yang bersifat homogen (*power is homogenous*). Homogenitas yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan hanyalah tunggal, dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang. Kasus dalam studi ini menunjukkan bahwa salah satu pasangan calon wali kota ialah putra dari Presiden Joko Widodo yang pada saat ini menggenggam kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Atas hal tersebut maka, pemaknaan kepemilikan tunggal atas kekuasaan secara otomatis berpihak pada Gibran. Sehingga masyarakat Kota Solo yang sebagian besar adalah etnis Jawa dan memegang teguh nilai kebudayaan Jawa, terarahkan kepada Gibran. Fenomena tersebut dikuatkan oleh sebagian besar penuturan informan kepada penulis.

Gibran secara elektoral diuntungkan oleh trah tersebut karena kekuasaan saat ini melekat pada keluarganya. Orientasi politik masyarakat

Kota Solo didorong oleh faktor itu, jauh lebih ekstrem lagi seperti yang penulis temukan di lapangan bahwa terdapat pemaknaan Gibran adalah Jokowi dan Jokowi adalah Gibran (lihat tabel 2). Kala masyarakat melihat Gibran dalam kapasitasnya sebagai calon wali kota dimaknai seperti mereka melihat Jokowi. Tentu hal ini adalah stimulus politik bagi Gibran. Namun, salah satu sisi kontras dari potret politik tersebut adalah ideologi tidak menjadi pendorong utama di Pilwalkot Solo. Kharismatik figur yang dalam hal ini ditonjolkan oleh Gibran selaku anak Jokowi justru yang menguasai percakapan publik.

GIBRAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gibran adalah Jokowi 2. Pembangunan di Kota Solo pasti akan maju selama 5 tahun mendatang 3. Hegemoni politik oleh trah Joko Widodo di Kota Solo yang ditunjukkan melalui politik dinasti. 4. Atmosfer politik dan demokrasi menjadi tidak sehat dengan majunya Gibran
BAJO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pemain ketiga di belakang Bajo yang membiayai ongkos politik 2. Majunya Bajo adalah prematur dan dipaksakan maju melawan Gibran
Tabel 2. Pemaknaan Pasangan Calon Berdasarkan Pembagian Informan

Selain itu, pemaknaan latar belakang famili sangat tendesius mengarah pada dinasti politik. Meskipun Gibran berkali-kali menerangkan bahwa pencalonannya sebagai calon wali kota adalah hak konstitusional, namun *Jokowi effect* tetap saja melekat pada postur politiknya. Patronase semacam ini merupakan potret lumrah perpolitikan Indonesia sebagaimana terjadi pula di berbagai daerah yang mengarah pada dinasti politik seperti famili Chasan Shohib yang menguasai politik lokal di Provinsi Banten. Seharusnya, apabila benar Gibran ingin membuktikan diri sebagai calon Wali Kota yang terbebas dari belenggu dinasti politik dan maju murni dengan hak konstitusionalnya, tunggu hingga kursi Presiden tidak lagi dijabat oleh Joko Widodo.

Beranjak ke Bajo, pemaknaan terhadap calon independen ini sama halnya dengan Gibran yang masih tendensi ke konotasi yang negatif. Terlebih dua informan yang penulis temui memiliki pengalaman langsung dengan Bajo beserta tim kampanye. Bajo adalah sosok yang tertutup dan melakukan permainan politik. Apa yang ditangkap publik semakin menyingkirkan popularitas Bajo di tengah elektabilitasnya yang jauh tertinggal dari Gibran – Teguh. Terlebih lagi terdapat dugaan makelar KTP yang disokong oleh pihak ketiga selama pengajuan berkas verifikasi calon ke KPUD Kota Solo. Bukti yang penulis temukan yang berasal dari penuturan DAR di mana salah satu pengurus struktural PKS Kota Solo didatangi oleh tim verifikator KPU yang melakukan pengecekan ulang atas KTP nya yang terdaftar sebagai pendukung Bajo.

Kemudian, proses abstraksi pada studi kritis memandang bahwa penguasaan tunggal atas kekuasaan mengarah pada dinasti politik dan cenderung pada praktek-praktek otoritarianisme. Trah Joko Widodo menikmati surplus modal sosial berupa nilai politik yang melekat pada mereka sehingga dengan sendirinya apabila digunakan dalam kontestasi Pemilu, adalah unggul lebih jauh dibandingkan rivalnya. Gibran pada hakekatnya memanfaatkan kelebihan tersebut, hal ini terbukti bahwa rekomendasi partai akhirnya jatuh ke tangannya yang padahal kurang dari satu tahun terdaftar sebagai kader partai PDI-P dibandingkan dengan Purnomo yang sedari awal memang disiapkan oleh PDI-P menggantikan Rudy maju di Pilwalkot Solo 2020.

Konsepsi pemaknaan kekuasaan yang berada pada genggamannya individu berimplikasi pada tidak menyebarnya pemahaman terhadap pentingnya kekuasaan yang seharusnya terdistribusi ke individu atau kelompok lain. Menambahkan juga, hal ini turut menihilkan kesempatan bagi individu lain atas akses kepada kekuasaan serta mematikan langkah terhadap literasi politik. Maka sesungguhnya, perhelatan merebut kursi AD 1 telah sia-sia. Seluruh sumber politik baik perangkat pemerintah kota, karena ia berangkat dari partai politik petahana, telah dikooptasi oleh Gibran sebagai keturunan penguasa nasional hari ini. Majunya Gibran sebagai calon wali kota tidak mencerminkan gaya politik pemimpin abad modern yang dibayang-bayangi oleh pengaruh famili.

Apa yang dijalankan oleh Gibran dan kekuatan politiknya adalah bentuk penindasan terhadap literasi politik dan berbahaya bagi iklim demokrasi modern. Postur politik Gibran mempertontonkan bagaimana masih berpengaruhnya sistem feodalistik dalam merebut kursi pemerintahan kota. Maka, majunya ia di Pilkada Solo sebenarnya tidak perlu masa kampanye atau calon boneka yang sengaja dibuat untuk menjauhi kotak kosong, ia secara prematur sudah memenangkannya lebih dahulu. Hal ini membuat kontestasi pemilihan wali kota yang seharusnya disambut gegap gempita oleh masyarakat kini hanya sebatas dongeng belaka. Narasi yang menginfiltrasi ruang publik ialah justru dinasti politik yang didasari oleh penguasaan tunggal terhadap kekuasaan

KESIMPULAN

Studi ini mengelompokkan bahwa kelompok Pancasila berada di belakang Gibran – Teguh baik berupa mesin partai ataupun simpatisan. Mereka kompak menyokong gerbong Gibran – Teguh selama Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Dalam telaah strukturasi, orientasi politik masyarakat Kota Surakarta masih terjebak dalam romantisme feodalisme yang menjunjung figure. Hal ini berimplikasi pada model kekuasaan yang mencekram yakni PDI-P secara efektif menggenggam penguasaan sumber daya politik dengan sumber daya manusia sehingga mampu menjaga konstituen. Kacamata studi ini juga mengelaborasi pendekatan studi kritis dalam melihat ideologi, fenomena majunya Gibran dan pemaknaan kekuasaan di Kota Solo. Apa yang ditunjukkan oleh individu dan komunal terhadap ideologi, terkhususnya Pancasila, hanyalah retorika belaka. Makna Pancasila sebagai ideologi tergerus oleh penyempitan makna. Seharusnya ia dimanifestasikan dalam satu kutub tafsir ideologi besar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dimaknai secara sempit sebagai agenda politik praktis. Sejalan dengan itu, pemaknaan kekuasaan juga mengalami disrupsi. Proses internalisasi makna kekuasaan yang bersumber pada satu individu atau kelompok berimplikasi pada tidak terdistribusi pengetahuan dan akses terhadap kekuasaan itu sendiri. Gibran yang dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo ialah juga keturunan Joko Widodo, pemangku kekuasaan nasional hari ini. Maka, orientasi politik masyarakat Kota Solo

yang memilih Gibran yang didorong oleh kesamaan keturunan menunjukkan terkekangnya pemahaman politik masyarakat Kota Solo pada pusaran simbolik. Bentuk praktik politik semacam ini jauh dari unsur meritokrasi yang dibuktikan dengan kemampuan dan prestasi bukan bayang-bayang famili.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, M. A., & Asyifani, K. (2020). Traditionalist Muslim In 2019 Presidential Election: Explaining The Islamic Movement In Pasar Kliwon District Of Surakarta City.
- Alauddin, M. A., & Asyifani, K. (2021). ‘Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 15-28.
- Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. ITHACA; LONDON: Cornell University Press. Retrieved June 24, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv3s8n2s>
- Antlov, H., Antlöv, H., & Cederroth, S. (Eds.). (1994). Leadership on Java: Gentle hints, authoritarian rule (Vol. 16). Psychology Press.
- Arif, A. (2018). *Jokowi's Populism, Wealth and Local Democracy in Solo City*. KnE Social Sciences, 16-25.
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2018). Mapping the Indonesian political spectrum. *New Mandala*, 24.
- B. Gama, B. Sudardi, W. Abdullah, and M. Wijaya, “Construction of *Blusukan* Meaning in the Campaign of Regional Heads”, *sshj*, vol. 3, no. 07, pp. 1416-1427, Jul. 2019
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Bulkin, Nadia. (2013). Indonesia's Political Party. Resource Page – Carnegie Endowment for International Peace. Diakses pada 15 Februari 2020 dari <https://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political-parties-pub-53414>
- Dobratz, B. A. (2015). Power, politics, and society: an introduction to political sociology. Routledge.
- Drake, M. (2010). Political sociology for a globalizing world. Polity.

- Eagleton, T. (2014). *Ideology*. Routledge
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDI-P, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 135-157.
- Giddens, Anthony. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Univ of California Press.
- Harvey, L., 1990, *Critical Social Research*, London, Unwin Hyman, all rights revert to author. (A modified version, 2011, is available at <http://www.qualityresearchinternational.com/csr>, updated 9 May, 2011.)
- Joebagio, H. (2017). The Diversity of Surakarta Community: A Blessing toward Democracy. *American International Journal of Social Science*, 6(1), 16-22.
- Machmudi, Y. (2008). Islamising Indonesian: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) (p. 279). ANU Press.
- Margana, S., & Nursam, M. (Eds.). (2010). *Kota-kota di Jawa: identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial*. Ombak.
- Mietzner, M. (2012). Ideology, money and dynastic leadership: the Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research*, 20(4), 511-531.
- Morfit, M. (1981). Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government. *Asian Survey*, 21(8), 838-851
- Noor, F. (2016). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Notonegoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Peacock, J. L. (1978). *Muslim puritans: reformist psychology in Southeast Asian Islam*. Univ of California Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prenada Media, 121.

- Sari, K. A. R. T. I. K. A. (2011). Gerakan Sarekat Islam (Si)-Merah (Persinggungan antara Islam dan Komunis di Indonesia Tahun 1920-1926) (Doctoral dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Stones, R. (2005). *Structuration theory*. Macmillan International Higher Education.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2014). Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya. *Antropologi Indonesia*.
- Syahri, Moch. (2015). *Strukturasi Anthony Giddens*.
- Valiana, A. (2017). Analisis Strategi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemenangan Rudi Dan Purnomo Dalam Pilkada 2015 Kota Surakarta. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Yahya, Ismail. (2016). *Kebangkitan Muslim Tradisional di Surakarta*. *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol. 14, No. 1 hal 51-56.